

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi
Lampung Utara)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

**M. RAFIRSA AGUNG PRATAMA
NPM 1621020526**

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iiyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
UTARA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi
Lampung Utara)**

**Skripsi
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh
**M. RAFIRSA AGUNG PRATAMA
NPM 1621020526
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**Pembimbing I : Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : H. Rohmat, M.H.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

ABSTRAK

Bantuan Hukum sebagai kewajiban Negara untuk memenuhi hak konstitusional dalam memenuhi hak setiap warga negara atas perlindungan hukum dan jaminan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia (HAM) terutama untuk masyarakat miskin. Dalam rangka mencari keadilan telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di kabupaten Lampung Utara juga diatur oleh Perda Nomor 4 Tahun 2013.

Permasalahan penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Utara? dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Utara?

Penelitian ini menggunakan pendekatan jenis penelitian studi lapangan (*field reseach*). Data yang digunakan yaitu dengan menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*), rekontruksi data (*reconstructing*) dan sistematisasi data (*sistemazing*). Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam metode berfikir induktif. Sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang pemberian bantuan hukum di Kabupaten Lampung Utara dalam upaya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya baik itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013, dan diperkuat dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014. 2). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang pemberian bantuan hukum di Kabupaten Lampung Utara dalam perspektif fiqh siyasah telah sesuai dengan hukum Islam dan dibolehkan atau wajib. Karena dalam sejarah Islam sendiri telah mengenal pemberian kuasa kepada orang lain yang sesuai dengan keilmuannya/ahlinya. Seperti yang telah dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang mewakili suatu perkaranya.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rafirsa Agung Pratama

NPM : 1621020526

Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah** (Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bandar Lampung, 8 Mei 2020
Penulis,

M. Rafirsa Agung Pratama
NPM. 1621020526

MOTTO

وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ
تُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya : “dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil”. (Q.S al-Maidah : 42)¹



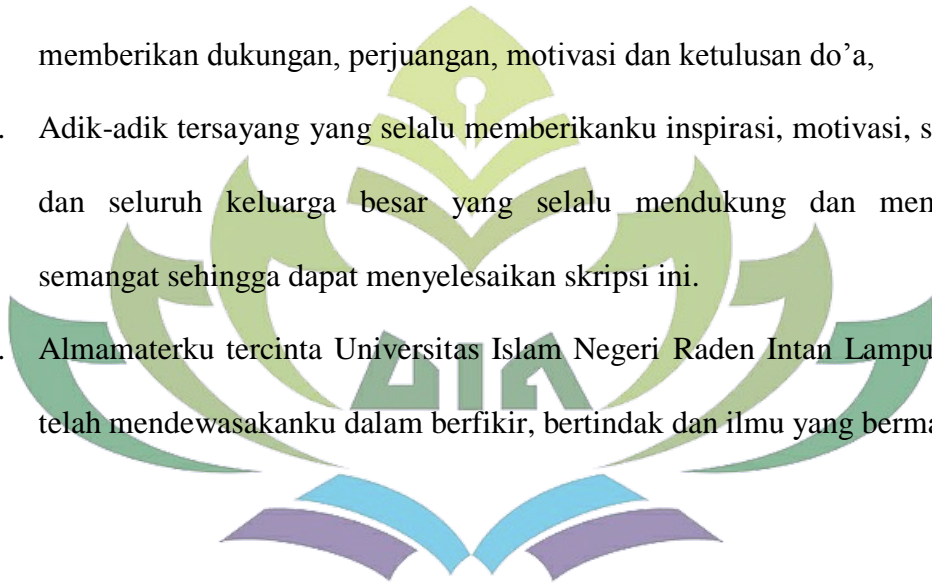
¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah, al-Maidah Ayat 42*, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), h. 115.

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang diberikan-Nya, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda M. Roni (Teguh) dan Ibunda Ayuna yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, mendidik, memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan ketulusan do'a,
2. Adik-adik tersayang yang selalu memberikanku inspirasi, motivasi, semangat dan seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir, bertindak dan ilmu yang bermanfaat.



RIWAYAT HIDUP

M. Rafirsa Agung Pratama, lahir pada tanggal 19 September 1998 di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung, Indonesia yang merupakan Anak Pertama dari enam bersaudara, anak dari pasangan Bapak M. Roni dan Ibu Ayuna. Beralamat di Dusun Campang Tiga RT/RW 001/005, Desa Cempaka Barat, Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Indonesia.

1. Penulis mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Cempaka Barat (SD N 2 Cempaka) pada tahun 2004-2010. Selama duduk dibangku Sekolah Dasar ini penulis aktif dibidang ekstrakurikuler Pramuka.
2. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungkai Jaya (SMP N 1 Sungkai Jaya) pada tahun 2010-2013. Selama duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama ini penulis aktif dalam ekstrakurikuler Olahraga Sepakbola.
3. Pada Sekolah Menengah Atas, Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA N 2 Kotabumi pada tahun 2013-2016. Selama Sekolah Menengah Atas penulis aktif dalam kepengurusan ekstrakurikuler Olahraga (Badminton).
4. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah.

Bandar Lampung, 8 Mei 2020

M. Rafirsa Agung Pratama
1621020526

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi)” dapat diselesaikan. Sholawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi dan fasilitas yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil hingga terselesaikan skripsi ini. Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.

3. Bapak Frenki. M.Si sebagai Ketua Jurusan/Prodi dan, Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H. dan H. Rohmat., M.H.I, selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen-dosen dan staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu di bangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kedua orang tua Papahku (M. Roni) dan Mamahku (Ayuna) tercinta, yang selalu memanjatkan Do'a serta dukungan yang tiada henti dan letih demi kesuksesan anaknya, kerja keras kalian untuk mencari rezeki demi untuk mensekolahkan anaknya menuntut ilmu hingga sampai saat ini guna bekal hidup dunia serta akhirat. Ucapan terima kasih kepada Mamah dan Papah, hanya bisa ananda balas dengan Do'a dan selalu berjuang menjadi anak yang taat hanya semata-mata ingin melihat senyuman bahagia Papah dan Mamah. Adik-adikku (Ahy Megi Riyan Mahmudi, Gusti Intan Revi Ria Dynensi, Adin Rahmad Dhiki Sakti, Ahun Rahmad Dhika Sakti dan Muhammad Alfi Al-Faris) yang turut mendoakan, mensupport serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Kedua Keluarga Besar orangtuaku Sidi Ratu Budiman (Alm.) & Zat Rodiah, Datuk H. Firdaus & Sidah Nursidah (Almh.), Papi, Ibuajo, Wak Ibu,

dan Iyak, serta persepupuan Duli Nana, Ajo Ledi, Uni Felia, Ses Enzi, Susi Ira, Jefry, Rika, Nia, Ade, Indah, Fajar.

8. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
9. Keluarga Besar HMI Komisariat Syari'ah Kanda Yunda alumni, Pengurus HMI Komisariat Syari'ah 2018-2020. Kanda, Yunda dan Adinda Himpunan Mahasiswa Islam (HmI) Komisariat Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
10. Teman-teman yang selalu mendukung, membantu dan menemani dalam keadaan apapun, Fitra Rinaldi Fasya, Yus Afrida, Heni Aprilia, Dea Indah Monica, Lisa Anisa Fricchillia, Retno, Eka, Virga, Elkadri, Fenti, Evi, Soni Saputra, Ahmad Aldi Nugraha, Andi Ridoni, Kelompok KKN Kelompok 104-105, Kelompok PPS 25, Asrama Tawakal (Aldi, Andi, Iqbal, Eko) dan Cempaka Squad (Risky, Yosef, Andre, Ryan, Diky, Jahidi dan lainnya).
11. Saudara-saudara seperjuangan dalam menuntut ilmu Siyash G (@siyashg_aul) angkatan 2016.
12. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan semoga mendapatkan balasan dari Allah Swt atas kebaikannya selama ini, semoga menjadi amal sholeh. Aamiin...

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karena

itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini.

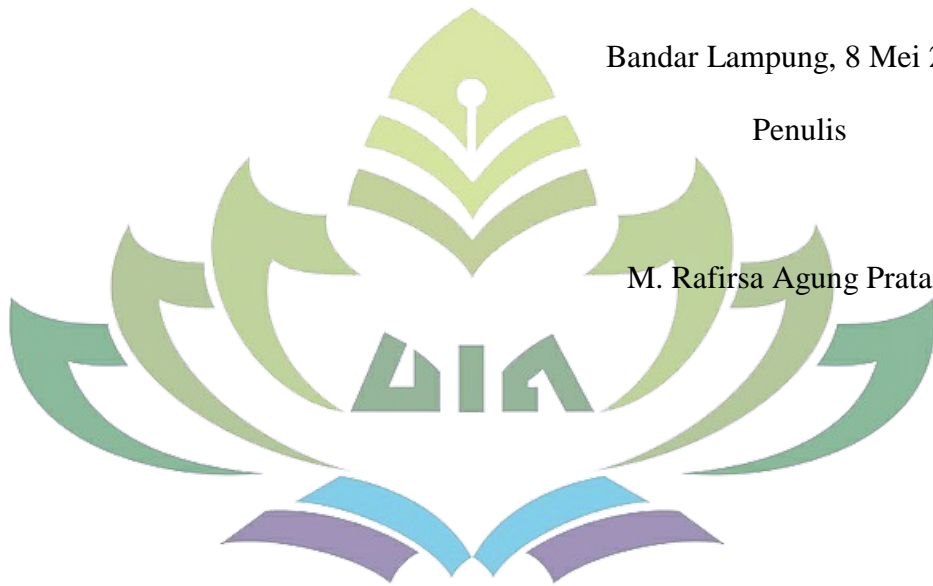
Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman dan ilmu hukum di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Bandar Lampung, 8 Mei 2020

Penulis

M. Rafirsa Agung Pratama



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	8
E. Rumusan Masalah.....	8
F. Tujuan Penelitian.....	8
G. Kegunaan Penelitian.....	9
H. Metode Penelitian.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	15
B. Bantuan Hukum Dalam Islam.....	24
C. Bantuan Hukum Dalam Hukum Positif	34
D. Tinjauan Pustaka.....	56

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Tentang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi	60
1. Sejarah Berdirinya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi.....	62
2. Visi Misi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi.....	61
3. Program Kegiatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi.....	62
4. Struktur Kepengurusan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi.....	64
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Kabupaten Lampung Utara	67

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Kabupaten Lampung Utara dalam Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Lampung.....	89
B. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Lampung Utara.....	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Rekomendasi.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
1. Tabel struktur kepengurusan Lembaga Menang Jagad Kotabumi.....	66
2. Data bantuan hukum LBH Menang Jagad Kotabumi Tahun 2017.....	68
3. Data bantuan hukum LBH Menang Jagad Kotabumi Tahun 2018.....	70
4. Data bantuan hukum LBH Menang Jagad Kotabumi Tahun 2019.....	72
5. Daftar penerima bantuan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019	74
6. Daftar penerima bantuan hukum PerMenhukam Tahun 2019.....	75
7. Daftar penerima bantuan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018	76
8. Daftar penerima bantuan hukum PerMenhukam Tahun 2018.....	77
9. Data penanganan perkara oleh Advokat Menang Jagad Kotabumi Tahun 2017	79
10. Data penanganan perkara oleh Advokat Menang Jagad Kotabumi Tahun 2018	79
11. Data penanganan perkara oleh Advokat Menang Jagad Kotabumi Tahun 2019	79
12. Prosedur perolehan bantuan hukum.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Peraturan Daerah	1
Lampiran 2 : Surat Riset	2
Lampiran 3 : Pedoman Wawanacara.....	3
Lampiran 4 : Kartu Konsul	4
Lampiran 5 : Dokumentasi Pendukung.....	5



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul digunakan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan benar dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul ini, yaitu **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara)”**.

Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembahasan dalam memahami judul. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

Implementasi merupakan terjemahan bahasa inggris yang berasal dari kata Implementation yang artinya pelaksanaan.¹ Sedangkan menurut bahasa Indonesia artinya adalah pelaksanaan, penerapan.²

Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk peraturan pelaksanaan undang-undang³. Maksud peneliti peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk diberlakukan di daerah-daerah atau kampung-kampung agar pelaksanaan peraturan tersebut bisa dijalankan sesuai dengan harapan pembuat peraturan daerah.

¹ Jhon M. Echolas dan Hasan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 313.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 529.

³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 190.

Perspektif adalah suatu pandangan atau gambaran dari pendapat atau aturan untuk melihat dan menilai suatu objek yang diteliti.⁴

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek Hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁵

Bantuan hukum adalah sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.⁶

Masyarakat miskin adalah suatu standar sebagai suatu standar tingkat kehidupan yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang yang dibandingkan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah meninjau dari sudut pandang salah satu aspek fiqh siyasah terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya sebagai berikut:

⁴ Agus Sulistyono dan Adi Mulyadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta : CV. Surakarta, 2008), h. 273.

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Pranamedia, 2014), h. 4.

⁶ Bambang Sunggono & Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 7.

⁷ M. Wagianto, *Peran dan Fungsi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*, (Bandar Lampung: Calina Media & Arti Bumi Intaran, 2017), h. 178.

1. Alasan Objektif

Alasan yang mendasari dipilihnya judul ini karena dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum masih terdapat masyarakat miskin yang memiliki hambatan-hambatan tentang ketidaktahuan masalah hukum, biaya, ataupun hal lainnya. Sedangkan dalam bantuan hukum ini sangatlah penting dilakukan oleh lembaga bantuan hukum karena untuk mendampingi masyarakat yang sedang memerlukan bantuan hukum dalam rangka memperoleh keadilan (*justice*) sebagaimana suatu bentuk bagian dari hak asasi manusia bagi semua orang termasuk fakir miskin di Lampung Utara.

2. Alasan Subyektif

Pokok bahasan ini sangat relevan antara hubungan penelitian dengan disiplin ilmu pengetahuan adalah erat sekali⁸ yang penulis pelajari di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) serta tersedia literatur dan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan didalam perpustakaan pusat maupun Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum telah jelas termuat secara konstitusional disebutkan pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945. Para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan negara kekuasaan

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 4.

(*machtstaat*). Dalam negara hukum, individu dan negara dibatasi konstitusi dan diatur undang-undang. Negara hukum juga harus dapat menjamin persamaan dimata hukum serta mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak warga masyarakatnya, karena setiap manusia memiliki hak asasi manusia untuk diperlakukan sama dimata hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Persamaan perlakuan dimata hukum ini juga harus ada perlakuan yang sama dimata hukum (*equal treatment*) dengan mendapatkan sebuah upaya-upaya pelayanan hukum yaitu memberikan bantuan hukum.⁹

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Bantuan hukum itu bersifat membela atas hak-hak masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya.¹⁰ Kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Karena dalam setiap proses hukum, khususnya hukum pidana, pada umumnya setiap orang yang di tetapkan sebagai tertuduh dalam suatu perkara pidana,

⁹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), h. 51-52.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 16.

tidaklah mungkin dapat melakukan pembelaan sendiri dalam suatu proses hukum dan dalam pemeriksaan hukum terhadapnya. Banyaknya insiden perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang advokat (penasihat hukum) profesional. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlakukan untuk membela fakir miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan tidak adil, serta merendahkan derajat manusia. Yang dilakukan oleh penegak hukum. Oleh karena itu tersangka/terdakwa berhak memperoleh bantuan hukum.

Bantuan hukum hadir untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia demi terciptanya negara hukum (*rechtstaat*). Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu hak yang terpenting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, telah disebutkan bahwa bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum baik itu orang atau kelompok orang miskin yang sedang menghadapi masalah hukum sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.¹¹ Karena dalam proses hukum adalah masalah yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia guna mewujudkan hak-hak

¹¹ IGN. Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: (Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), h. 26.

konstitusional. Bantuan hukum berkembang bukan hanya dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan pula menjadi salah satu metode dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum rakyat, menjamin penegakan hukum, kepastian hukum, serta pelayanan pembelaan hukum dengan berbagai usaha dalam hal pemberian pelayanan bantuan hukum.

Dalam Islam, memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin itu sangatlah penting terutama sebagai akses dalam menegakan keadilan dan hak asasi manusia demi tercapainya kehidupan yang baik dan tertata. Dengan ini jelas bahwa apa yang telah terjadi perwakilan dalam menegakan keadilan harus sesuai dengan hukum Allah.¹²

Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas bahwasannya dasar legalitas dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dalam Islam meliputi Alquran, Hadits, dan ijma ulama. Dalam sebuah Hadist disebutkan:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رَوَاهُ الْحَاكِم)¹³

“Dan Allah akan menolong hamba-Nya selama hamba-Nya menolong saudaranya”. (HR. al-Hakim).

¹² Muhammad Faqih Muslim, *Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009), h. 6.

¹³ Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad al-Hâkim, *Al-Mu tadarak ‘alâ Shahîhayn* (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H), h. 427.

Bantuan hukum dalam al-Qur'an juga dijelaskan, yaitu dalam Q.S Al-Qashash : 33-34 yang berbunyi :

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿٣٣﴾ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۖ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٤﴾

Artinya: *Musa berkata: "Ya Tuhanku Sesungguhnya Aku, telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, Maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun Dia lebih fasih lidahnya daripadaku, Maka utuslah Dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan)ku; Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku". (Q.S. Al-Qashash: 33-34)*¹⁴

Bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan dinegara-negara berkembang demikian Indonesia.¹⁵ Didalam Islam telah diajarkan untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu dalam kebaikan sesama umat manusia dan Islam pun mengajarkan umatnya untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan pertolongan, sebagaimana firman Allah, QS. al-Maidah: 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya; *"tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah, al-Maidah* Ayat 2, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), h.389.

¹⁵ *Ibid*, h. 11.

pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”(Q.S. Al-Maidah : 2)¹⁶

Berdasarkan ayat diatas yang menyatakan bahwa Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebutlah, peneliti merasa tertarik untuk membahas mengenai sejauhmana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 4 Tahun 2013 dalam melaksanakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Maka penyusunan skripsi ini diberi judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara.”

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Karena kasus pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskinatau kurang mampu sebagian besar masih jarang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dalam mendampingi perkara. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam hal ini diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 dan diperkuat oleh Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2014, serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah, al-Maidah* Ayat 2, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), h. 106.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Utara?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Kabupaten Lampung Utara.

G. Signifikan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin dari suatu lembaga bantuan hukum.

2. Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisis data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.¹⁷ Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari lembaga bantuan hukum.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.¹⁸

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber dari objek penelitian atau responden.¹⁹ Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau

¹⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 12.

¹⁸ Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 44.

¹⁹ *Ibid*, h. 98.

penelitian. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di yayasan lembaga bantuan hukum Kotabumi Lampung Utara.

- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang terkait dengan ayat-ayat Alquran, Hadits, ijma ulama, Undang-Undang Bantuan Hukum, buku-buku yang berkaitan dengan bantuan hukum, serta media on-line seperti jurnal dan blog. Sumber data yang mendukung sumber data primer berupa buku-buku dan literatur tentang persidangan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari yayasan lembaga bantuan hukum di Kotabumi Lampung Utara.²⁰

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.²¹ Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²² Dalam skripsi ini populasinya adalah seluruh masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum

²⁰ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 85.

²¹ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 120.

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara sesuai dengan jumlah penerima bantuan hukum pada Peraturan Menkumham dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tahun 2019 50 orang dan LBH Menang Jagad 10 orang yang populasinya berjumlah 60 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.²³ Sampel yang digunakan adalah metode *random sampling*, teknik yang digunakan apabila jumlah sampel dalam populasi banyak atau besar, yakni penentuan sampel dalam teknik ini dengan acak, sehingga setiap sampel dalam populasi tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota yang layak dijadikan sampel, yaitu 10% dari 60 orang populasi yakni 50 masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum dan 10 orang LBH Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara.²⁴ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Ketua LBH Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara (1 orang), sekretaris LBH Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara (1 orang), pengawas LBH Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara (1 orang), penerima bantuan hukum LBH Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara (3 orang). Maka dalam hal ini sampel dan populasi ini berjumlah 6 (enam) orang

²³ *Ibid*, h. 120.

²⁴ Yulianto Ahmad, Muti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h.172.

yang dilakukan di kantor LBH Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²⁵ Adapun yang diwawancarai adalah narasumber, yaitu ketua pimpinan lembaga bantuan hukum. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang di mana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti.
- b. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²⁶ Yang berhubungan dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam pengolahan data penulis melakukan dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.

²⁵ *Ibid*, h. 86.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 188.

b. Rekonstruksi data (*reconstructing*)

Yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

c. Sistematisasi data (*sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁷

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan melalui alat pengumpul data tersebut, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, sehingga diperoleh suatu kesimpulan penelitian. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yaitu penarikan kesimpulan atau fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁸

Dengan metode ini penulis dapat menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul dan dengan metode ini data yang ada dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari permasalahan. Di dalam analisa data penulis akan mengolah data-data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan lapangan. Data tersebut akan penulis olah dengan baik dan untuk selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

²⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cetakan Ke 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

²⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), hlm. 5.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

1. Definisi Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah berasal dari dua kata bahasa Arab yaitu *fiqh* dan *siyasah*. Kata *fiqh* secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti. Secara terminologi fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' dan dalil-dali yang *tafshil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan Sunnah).²⁹

Sedangkan, kata siyasah berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasah* juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Secara terminologi *siyasat* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Fiqh siyasah yang juga dikenal dengan nama *siyâsah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti:

- a. Menurut Imam al-Bujairimî: “Memperbagus permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.³⁰
- b. Menurut Wuzârat al-Awqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah bi al-Kuwait: “Memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka

²⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rias Grafindo, 1997), h. 21.

³⁰ Slaiman bin Muhammad al-Bujarimi, *Hasyiah al-Bujarima ala al-Manhaj* (Bulaq: Musththafa al-Babi al-Halabi, t.t), vol. 3, h.178.

pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka”.³¹

- c. Menurut Imam Ibn ‘Âbidîn: “Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyâsah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyâsah* berasal dari para sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyâsah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan”.³²

Jadi dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang membahas mengenai hukum yang mengatur hubungan antara penguasan dengan rakyatnya.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyâsah*.³³ Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.

Menurut Imam al-Mâwardî, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyâsah*-nya yaitu *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyâsah* adalah sebagai berikut:

³¹ Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu’at al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wuzarat al-awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t), vol. 25, h.295.

³² Ibn ‘Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi 1987), vol. 3, h.147.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 4.

- a. *Siyâsah Dustûriyyah* (politik Perundang-Undangan);
- b. *Siyâsah Mâliyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- c. *Siyâsah Qadlâ`iyyah* (kebijaksanaan peradilan);
- d. *Siyâsah Harbiyyah* (politik peperangan);
- e. *Siyâsah `Idâriyyah* (administrasi pemerintahan).

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyâsah al-Syar`iyyah*, ruang lingkup *fiqh siyâsah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyâsah Qadlâ`iyyah* (kebijaksanaan peradilan);
- b. *Siyâsah `Idâriyyah* (administrasi pemerintahan);
- c. *Siyâsah Mâliyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- d. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);

Sementara Abd al-Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyâsah Qadlâ`iyyah* (kebijaksanaan peradilan);
- b. *Siyâsah Dauliyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri);
- c. *Siyâsah Mâliyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, menurut T.M. Hasbi membagi *fiqh siyâsah* menjadi delapan ruang lingkup yaitu:

- a. *Siyâsah Dustûriyyah Syar`iyyah* (kebijaksanaan tentang Peraturan Perundang-Undangan);

- b. *Siyâsah Tasyrî'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum);
- c. *Siyâsah Qadlâ'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan);
- d. *Siyâsah Mâliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
- e. *Siyâsah 'Idâriyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara);
- f. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
- g. *Siyâsah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan Undang-Undang);
- h. *Siyâsah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan).³⁴

Dari sekian pemaparan tentang, ruang lingkup *fiqh siyâsah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok.

Pertama (1): politik Perundang-Undangan (*Siyâsah dustûriyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyrî'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadlâ'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*'Idâriyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Kedua (2): politik luar negeri (*Siyâsah dauliyyah/siyâsah khârijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warganegara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*siyâsah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan senjata.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 178-180.

*Ketiga (3): politik keuangan dan moneter (siyâsah mâliyyah), yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.*³⁵

3. Siyasah Tanfidziyyah

Fiqh siyasah dusturiyyah terbagi menjadi kepada empat bagian yang mana salah satu diantaranya adalah *siyasah tanfidziyyah*, yakni:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan perwakilan rakyat. Hubungan kaum muslimin dan non-muslimin di dalam suatu negara.
- b. Bidang *siyasah tanfidziyyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah* (kepala negara), persoalan *bai'ah* (perjanjian), *wuzarah* (petugas pembantu), *waliy al-ahdi* (lembaga perwakilan), lain sebagainya.
- c. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya terkait masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, di dalamnya membahas mengenai masalah administratif dan pegawaian.³⁶

Sesuai dengan tujuan negara untuk menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara memiliki tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Siyasah tanfidziyyah (politik pelaksanaan Undang-Undang) yang di dalamnya terdapat persoalan *imamah* (kepala negara), *bai'ah* (perjanjian),

³⁵ *Ibid*, h. 181.

³⁶ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Group, 2013), h. 47-48.

wuzarah (petugas pembantu *imamah*), dan *waliy al-ahdi* (lembaga perwakilan). *Imamah* melaksanakan tugasnya, memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan Perundang-Undangan yang telah dirumuskan melalui kekuasaan eksekutif atau pelaksanaannya adalah Pemerintah dan dibantu oleh instansi perwakilan negara lainnya.³⁷

4. Siyasah Qadla'iyyah

a. Bantuan Hukum dalam Fiqh Siyasah

Berdasarkan ruang lingkup fiqh siyasah, bantuan hukum terdapat pada pembahasan *siyâsah qadlâ'iyyah syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan). *siyâsah qadlâ'iyyah* merupakan ketentuan kebijaksanaan mengenai tugas dan wewenang peradilan yang ada di suatu negara. Karena negara merupakan sekumpulan pemahaman dan keyakinan yang diterima oleh umat. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah lembaga peradilan dalam negara. Dengan lembaga ini bertugas menyampaikan keputusan baru yang bersifat mengikat. Lembaga ini merupakan *thariqah syar'iyah* (metode syariah) dimana mempunyai tugas untuk menjaga keberlangsungan penerapan pemahaman, standarisasi dan keyakinan. Keberadaan lembaga ini hukumnya wajib.

Qhodi atau hakim menjalankan hukum Islam kepada seluruh rakyat dan mengambil putusan-putusan berdasarkan syariat. Oleh karena itu, peradilan merupakan salah satu pilar yang fundamental

³⁷ *Ibid*, h. 48-49.

dalam negara Islam. Inilah sistem pemerintahan yang disandarkan sebagai bagian implementasi Islam dalam kehidupan politik.

Pemberian bantuan hukum oleh LBH memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri dalam memberikan bantuan hukum, dimana telah dijamin oleh hukum dan peraturan Perundang-Undang. Artinya adalah pemberian bantuan hukum dalam kedudukannya telah ada landasan.

Pada agama Islam bantuan hukum dikenal dengan *al-wakalah* atau *al-wakilah*. Karena sistem wakalah dipengadilan banyak kemiripan dengan sistem advokat atau pengacara. Menurut bahasa, *wakalah* atau *al-wakilah* berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mura'at wa al hifzu*, dan *al tafwid al-i'timad* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian kuasa kepada seseorang.³⁸ Menurut para fuqaha *wakalah* adalah memberi kekuasaan kepada orang lain yang akan bertindak atas namanya untuk melakukan sesuatu perbuatan yang memang dapat diwakilkan. *Wakalah* juga merupakan bentuk transaksi (akad) yang bersifat tolong menolong.³⁹

b. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Para ahli fiqh menyatakan, bahwa pemberian bantuan hukum atau wakalah dibolehkan dalam Islam. Dasar hukum dari kebolehan tersebut antara lain :

³⁸ Asumni Mth, "Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 12 No. 4 (2014), h. 27.

³⁹ *Ibid*, h. 28.

1) Dalil Al-Qur'an

Dalam Q.S al-Kahfi ayat 19, yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾ (الكهف: ١٩)

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. (Q.S. al-Kahfi :19)⁴⁰

Dari ayat diatas, jumhur ulama membolehkan berwakil dalam segala hal termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Dalam berperkara, menurut Abdul Aziz al-Hamidi, manusia sangat membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab pada saat-saat tertentu seorang lemah dalam menegakkan hak atau kemaslahatan umat dirinya: misalkan karena sakit, tidak mengetahui hukum acara, atau sibuk sehingga tidak mungkin menghadapi sepenuhnya sidang perkara. Biasanya ada kebenaran yang belum terungkap dalam suatu perkara, seperti pembuktian tuduhan atau tuntutan

⁴⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah, al-Kahfi* Ayat 19 (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), h. 295.

penuntut, gugatan penggugat dan penolakan tuduhan atau gugatan.⁴¹

2) Dalil Hadits

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك: ٦٧٨)

Artinya : “Bahwasannya Rasulullah Saw., mewakilkan kepada Abu Rafi’ dan seorang anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Harits.” (H.R Malik : 678)⁴²

Setidaknya ada empat rukun dalam *wakalah*, yakni : pihak pemberi kuasa (*muwaqil*), pihak penerima kuasa (wakil), obyek yang dikuasakan (*taukil*) dan ijab qobul (*sighat*).⁴³ Kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lainnya.

3) Dalil Ijma’

Secara umum, tidak ada perselisihan antar ulama mengenai bolehnya mewakilkan dalam suatu persengketaan baik dalam harta, pernikahan dan sejenisnya. As-Sarakhsi (490 H) berkata, “Perwakilan dalam pengadilan sudah ada sejak jaman Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam hingga hari ini tanpa adanya

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 981.

⁴² Malik bin Anas al-Ashabihi, *Al-Muwathatha’* (Beirut: Daar Kutun al-‘Alamiyah), h. 250.

⁴³ *Ibid*, h. 982.

pengingkaran dari siapa pun”. As-Sumnani (449 H) menjelaskan tentang pengacara, “Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga pernah mewakilkan, demikian pula para imam yang adil dari kalangan sahabat dan tabi’in”. dan hal ini pula diamalkan oleh manusia di semua negara.⁴⁴

B. Bantuan Hukum Dalam Islam

1. Pengertian Bantuan Hukum dalam Islam

Bantuan hukum erat kaitannya dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan setiap pemeluknya agar melindungi hak-hak setiap individu, bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan adanya kewajiban dalam menegakkan hukum dan keadilan setiap individu. Ketentuan tersebut merupakan dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam.⁴⁵

Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dalam bahasa Arab kuasa hukum disebut dengan *al-wakalah fi al-khusumah*. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. *Al-wakalah* disini masih bersifat umum, mencakup segala aktifitas perwakilan dalam bidang muamalah, seperti wakil dagang, wakil rakyat, wakil penguasa dan lain sebagainya. *Al-wakalah fi al-khusumah* (kuasa hukum) sendiri secara khusus

⁴⁴ <https://www.pengusahamuslim.com/2748-profesi-pengacara-mengapa-1460.com> (diakses pada tanggal 19 Januari 2020, Jam 20.50 WIB).

⁴⁵ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 28.

ditemukan dalam perkara atau sengketa di pengadilan. Sifat *wakalah* yang mewakili urusan orang lain, identik dengan perwakilan seseorang untuk membantu menyelesaikan sengketa, terutama dalam proses peradilan.⁴⁶

2. Kategori Bantuan Hukum dalam Islam

Dalam Islam terdapat tiga kategori profesi yang menjalankan tugas dan fungsi dalam memberikan jasa bantuan hukum, yaitu *hakam*, *mufti*, dan *mushalaih-alaih*. Ketiganya memiliki fungsi yang sama seperti halnya advokat, pengacara, arbiter, konsultan hukum, atau penasihat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan berupa konsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan sengketa, serta mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *islah* (mendamaikan).

a. *Hakam* (penengah)

Secara harfiah *hakam* dalam perspektif Islam adalah orang yang ditunjuk (berperan) sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa. Dalam kajian fiqh Islam penunjukan *hakam* disebut dengan *tahkim*. *Tahkim* berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja *hakkama-yuhakkimu-*

⁴⁶ Inda Areskha, "Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam)", (Skripsi Program Sarjana Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017), h. 17.

tahkiman yang berarti menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa.⁴⁷

Menurut ahli fiqh,⁴⁸ *tahkim* diartikan sebagai dua orang atau lebih mentahkimkan kepada seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara' atas sengketa mereka itu.

Hakam telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S an-Nisa ayat 35 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ (النساء: ٣٥)

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S an-Nisa : 35)⁴⁹

Pada masa Rasulullah *hakam* memiliki peran yang sangat luas tanpa adanya batasan bidang tertentu, serta memiliki wilayah *yurisdiksi* (wilayah tempat berlakunya sebuah UU yang berdasarkan hukum) yang tidak hanya berkaitan dengan perkara bisnis semata, akan tetapi menyangkut masalah keluarga, politik, perdagangan dan peperangan.

Tugas dari *hakam* bukanlah merupakan pekerjaan (*vocation beroep*), akan tetapi lebih merupakan profesi. Profesi *hakam* bukan

⁴⁷ Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 39.

⁴⁸ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* , (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.81.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah, an-Nisa Ayat 35*, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), h. 84.

hanya sekedar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah (*profit oriented*), profesi tersebut mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Profesi hakim sering kali disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya, miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi seseorang. Sebagai konsekuensinya ia harus menjalankan fungsinya untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya.⁵⁰

b. *Mufti* (ahli fatwa)

Secara etimologi, mufti berarti orang yang memberi fatwa. Fatwa (*legal advise*), adalah menjawab sesuatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Secara terminologi mufti adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia.⁵¹

c. *Mushalih-alaih* (peradilan)

Secara harfiah kata mushalih berasal dari akar kata *ash-shulhu-yushilhu-mushalih*. *Ash-shulhu* yang berarti memutus pertengkaran atau perelisihan. Secara terminologi adalah suatu jenis *aqad* untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.⁵²

⁵⁰ *Ibid*, h. 85.

⁵¹ T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 86.

⁵² Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 51.

Akad (perjanjian) merupakan hak setiap orang dan dapat dibenarkan apabila perjanjian itu dalam hal yang baik. Perjanjian biasanya dilakukan oleh orang atau kelompok terhadap suatu hal yang telah disepakati bersama. Perjanjian itu tidak dapat dibatalkan kecuali oleh kedua pihak yang telah melakukan perjanjian, dan pembatalan perjanjian itu juga tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak baik disengaja ataupun tidak disengaja. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak semua orang dapat menepati perjanjian. Maka dari itu akan dapat timbul perlawanan dari pihak lain sehingga akan menjadi suatu perselisihan atau persengketaan para pihak yang melakukan perjanjian.

Mendamaikan perselisihan diantara manusia merupakan sebuah kewajiban dan termasuk juga pekerjaan yang mulia (*offisium nobile*).

Allah berfirman dalam Q.S al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ (الحجرات: ٩)

Artinya: dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. (Q.S. al-Hujurat: 9)⁵³

⁵³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah, al-Hujurat Ayat 9*, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), h. 516.

Ayat diatas tersebut telah mengisyaratkan apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran maka harus diupayakan penyelesaian damai bila salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam perjanjian tersebut harusla diberi sanksi hukum secara tegas. Sanksi hukum dalam hal ini harus melaksanakan kewajiban atau mengembalikan hak orang lain yang dirampasnya. Bila sudah melaksanakan kewajiban tersebut maka damaikan kembali secara adil dan benar sesuai asas keadilan hukum.

3. Prinsip-Prinsip Bantuan Hukum dalam Islam

Menurut Didi Kusnadi⁵⁴, dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai advokat maka hendaknya memperhatikan prinsip penegakan hukum Islam yang sesuai dengan prinsip filsafat hukum Islam sebagai berikut:

a. Prinsip Ketuhanan

Prinsip ketuhanan (*al-tauhid*) dapat dijadikan pedoman oleh setiap advokat, pengacara, klien dan aparaturnya penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Dalam prinsip ini, maka siapa pun yang terlibat dalam penegakan hukum harus meyakini bahwa pembuat hukum yang mutlak adalah Allah. Maka dalam hal ini segala bentuk upaya yang telah dilakukan dalam proses penegakan hukum hendaklah didasari oleh kesadaran bahwa dalam menegakan hukum itu harus

⁵⁴ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 66.

dengan kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hukum yang tidak menyalahi hukum Allah.⁵⁵

b. Prinsip Keadilan

Pemberian bantuan hukum erat kaitannya dengan prinsip *access to justice* yang diusung oleh kalangan pemberi bantuan hukum atau pengacara, yang diarahkan bagi penguatan aspek permintaan meliputi: *pertama*, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak dasar; *kedua*, meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap kebijakan hukum positif dan hukum adat yang berdampak pada kehidupan mereka; *ketiga*, meningkatkan pengetahuan tentang berbagai saluran untuk mendapatkan pemulihan hak-hak yang dilanggar dan tidak dipenuhi.⁵⁶

Prinsip keadilan menurut al-Qur'an, manusia memiliki kewajiban untuk menegakan hukum Allah dan dilarang dalam menerapkan hukum lainnya yang bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan Allah. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Q.S. al-Maidah ayat 42 yang berbunyi :

وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾ (المائدة : ٤٢)

Artinya: *dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil,*

⁵⁵ *Ibid*, h. 68.

⁵⁶ *Ibid*, h. 69.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Q.S al-Maidah : 42)⁵⁷

Ayat diatas menjelaskan bahwa harus berlaku adil dalam memberikan putusan jasa hukum. Karena asensi dari proses peradilan adalah bukan menang atau kalah, tetapi berkeadilan untuk memberikan hak kepada orang lain.

Sebagai pemberi bantuan hukum dituntut untuk berlaku adil, karena tanpa keadilan akan memunculkan keberpihakan kepada pemilik uang dan banyak hal yang menyengsarakan sebagaimana yang terjadi dibanyak negara, termasuk negara Indonesia.

c. Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum

Berdasarkan prinsip ini, advokat haruslah dapat calon memposisikan kliennya sama dihadapan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya prinsip ini sering dilanggar. Orang yang kaya atau memiliki kekuasaan akan mendapatkan *privilege* (hak istimewa). Dalam al-Qur'an ayat yang mempertegas masalah ini adalah Q.S al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ (الحجرات : ١٣)

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara*

⁵⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah, al-Maidah Ayat 42*, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), h. 115.

kamu.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
(Q.S. al-Hujurat : 13)⁵⁸

Ayat di atas membahas tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Karena itu, ayat ini tidak menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Penggalan pertama ayat ini, "...sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan..." adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan pada nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁵⁹

Pengantar tersebut mengantar pada kesimpulan yang disebut oleh penggalan terakhir ayat ini yakni "Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah yang paling bertakwa". Oleh karena itu, berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi manusia yang lebih mulia disisi Allah. Dalam ayat ini menegaskan kesatuan asal usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar jika seseorang berbangga diri dan merasa dirinya lebih baik dari pada yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku, atau warna kulit dan sejenisnya, tetapi antara jenis kelamin mereka.⁶⁰

⁵⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah, al-Hujurat Ayat 13*, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), h. 517.

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 615-618.

⁶⁰ *Ibid*, h. 619-620.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa perbedaan kedudukan antar manusia bukan terletak dari suku, bangsa, ras, kasta, warna kulit atau sebagainya. Tetapi yang membedakannya adalah ketakwaan. Sehingga dapat diartikan bahwa manusia diciptakan memiliki hak persamaan antara sesama manusia, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat.

Berdasarkan hal ini, bantuan hukum dalam hal menjalankan tugasnya haruslah adil. Tidak pernah membeda-bedakan antara orang kaya atau miskin. Karena semua sama dihadapan hukum. Pemberian sanksi untuk tersangka/terdakwa telah didasarkan pada Undang-Undang tidak bisa didasarkan kepada keturunan, jabatan dan lain sebagainya.

d. Prinsip Tolong Menolong

Pada zaman Rasulullah tidak ada seorang muslim pun yang membiarkan muslim lain dalam keadaan kesulitan. Hal ini sudah tergambar sangat jelas ketika umat muslim hijrah dari Mekkah ke Madinah. Kaum anshor atau muslim Madinah menerima dengan baik kedatangan mereka yang seiman dengan sambutan yang meriah, kemudian mempersilahkan segalanya bagi para muhajirin. Anjuran untuk menolong dalam kebaikan dan takwa, yaitu fungsi *mahammy*, *hakam*, *arbiter* atau *mushalih alaih* selain memberikan jasa bantuan hukum juga bisa menjadi mediator profesional dalam proses penegakan hukum Q.S al-Maidah ayat 2:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّبِيبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾ (المائدة : ٢)

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. al-Maidah : 2)⁶¹

Dari ayat diatas Allah mengajak untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dengan beriringan ketakwaan kepada-Nya. Karena didalam ketakwaan, terdapat ridha Allah. Barang siapa yang memadukan antara ridha Allah dan ridha manusia, sungguh kebahagiaannya telah sempurna dan kenikmatan baginya sudah melimpah.

C. Bantuan Hukum Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Bantuan Hukum

Menurut segi bahasa, dalam bahasa Inggris istilah bantuan hukum dikenal dengan sebutan *legal aid* atau *legal service*. Keduanya mengandung makna sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan (*everyone who are looking for justice*). Lebih dari itu, bantuan hukum dengan segala bentuknya juga merupakan representasi dari akses mendapatkan keadilan (*access to justice*) dalam konteks semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum (*equality before the law*).⁶²

⁶¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah, al-Maidah* Ayat 2, (Surabaya: Pustaka Umum, 2006), h. 106.

⁶² Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 48.

Sebelum kemerdekaan, bantuan hukum diberikan secara darmawan pada seseorang yang peduli terhadap bangsa Indonesia yang dijajah pada saat itu. Maka dari itu pada zaman itu seseorang yang paham akan hukum memberikan pertolongan bantuan hukum tanpa meminta imbalan pada seseorang penerima bantuan hukum.⁶³

Indonesia adalah negara hukum telah jelas termuat secara konstitusional disebutkan pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Para pendiri (*founding fathers*) Republik Indonesia telah bertekad untuk membentuk Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Dalam negara hukum, individu dan negara di batasi konstitusi dan diatur Undang-Undang.⁶⁴

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum itu adalah bantuan memberikan jasa untuk:

- a. Memberikan nasehat hukum,
- b. Bertindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun yang buta hukum.⁶⁵

⁶³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 70.

⁶⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), h. 51-52.

⁶⁵ Bambang, Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar maju, 2001), h. 8.

Prinsip dasar negara hukum ada tiga: Supremasi Hukum, persamaan di muka hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak boleh bertentangan dengan hukum. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam konstitusi pada Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945. Dengan demikian, negara mengakui adanya hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik para fakir miskin, oleh karena itu, masyarakat miskin pun berhak untuk mendapatkan jasa bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*), sama seperti orang yang mampu mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara.⁶⁶

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "*legal aid*" dan "*legal assistance*".⁶⁷ *Legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan

⁶⁶ Patra M.Zen, et al, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI dan AusAID, 2009, h.34-35.

⁶⁷ <http://www.academia.edu/7235503/.com> Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Kasus Pidana Studi Terhadap Aspek Normatif-Empiris di Surakarta, diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

berbeda kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.⁶⁸

Legal assistance dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium. *legal aid* selalu dihubungkan dengan orang tidak mampu yang miskin dan tidak mampu untuk membayar advokat. Namun, sebagian orang pula menafsirkan bahwa *legal aid* sejatinya sama dengan *legal assistance* yang selalu ditafsirkan pelayanan hukum yang diberikan oleh masyarakat advokat kepada masyarakat yang mampu. Tafsiran umum yang berlaku akhir-akhir ini, *legal aid* adalah bentuk pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu.⁶⁹ Disamping istilah “*legal aid*” dan “*legal assistance*” dikenal juga adanya istilah “*legal service*” yang kurang tepat jika diterjemahkan dengan bantuan hukum yang diartikan sebagai pelayanan hukum. *Legal service* merupakan segala bentuk pemberian bantuan hukum oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin tak ada seorang pun dalam masyarakat yang tidak memperoleh nasehat-nasehat hukum, karena alasan tidak mempunyai biaya.⁷⁰ Karena istilah “*legal service*” tersebut kurang tepat untuk digunakan maka istilah tersebut jarang digunakan dalam pembahasan-pembahasan mengenai bantuan hukum.⁷¹

⁶⁸ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 334.

⁶⁹ *Ibid*, h, 334.

⁷⁰ *Ibid*, h.334.

⁷¹ *Ibid*, h.14.

Secara umum di negara Indonesia bantuan hukum diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang pembela/pengacara terhadap klien-kliennya baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana didalam persidangan.⁷²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia miskin adalah tidak berharta atau serba kekurangan (penghasilannya sangar rendah).⁷³ Sedangkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum yang dimaksud dengan orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Hak dasar adalah hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan, atau tidak mampu secara ekonomi yang dapat dibuktikan.⁷⁴

Kata bantuan sendiri secara teknis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pertolongan yang berupa bantuan modal, tenaga ahli, sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh Penguasa atau Pemerintah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Berdasarkan penjelesan tersebut dapat kita peroleh kesimpulan bahwa bantuan hukum merupakan sebuah bantuan diberikan oeh tenaga ahli, dalam hal ini ialah Advokat, dalam proses

⁷²Abdurahman, *Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1980), h.13.

⁷³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 961.

⁷⁴ Lembaran Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

penegakan hukum guna mempertahankan hukum materil atau hukum formil.⁷⁵

Bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum di pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu di pengadilan, meliputi pembebasan biaya perkara, siding diluar gedung pengadilan, dan Posbakum pangadilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.⁷⁶

Definisi bantuan hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah pertolongan yang diberikan oleh Hakim terhadap seorang tertuduh atau para pihak dalam suatu perkara atau sengketa yang sedang diadilinya. Definisi mengenai bantuan hukum disebutkan dalam Pasal 22 Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat (selanjutnya disebut sebagai UU Advokat), yang menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat kepada secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.⁷⁷

Bantuan hukum berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dala promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*hak ekosob*).⁷⁸

⁷⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 1478.

⁷⁶ PERMA No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁷⁷ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁷⁸ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm.xi-xii.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yaitu orang atau kelompok masyarakat miskin dan marjinal (masyarakat kecil). Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, Menteri memberikan wewenang yaitu mengawasi dan memastikan penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Melakukan *verifikasi* dan *akreditasi* terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi kelayakan sebagai lembaga bantuan hukum.⁷⁹

⁷⁹ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. (Jakarta: Bphnt, 2013), Pasal 7.

- a) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
- b) Bantuan hukum meliputi masalah hukum pidana, perdata, dan tatausaha negara baik secara *litigasi* maupun *non litigasi*.
- c) Bantuan hukum yang dimaksud adalah menjalankan kuasa hukum, mendampingi, mewakili, membela, dan melakukan tindakan bantuan hukum lain untuk penerima bantuan hukum.⁸⁰

Bantuan hukum dapat diartikan jasa memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata, ataupun dalam perkara tata usaha negara didalam pengadilan, dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan.⁸¹

2. Syarat dan Tata Cara Bantuan Hukum

Bantuan hukum di dalam sistem Tata Hukum di Indonesia secara tertulis telah diakui di dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, dan secara khusus mendefinisikan maupun mengatur tentang persyaratan dan tata cara dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pada Pasal 14 dan 15 telah mengatur mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum:

Pasal 14 berbunyi :

- a) Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:

⁸⁰ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. (Jakarta: Bphntv, 2013), Pasal 1.

⁸¹ Lasdin Wlas. *Cakrawala Advokat Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1989), h.119.

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 - 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.
- b) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 15 berbunyi :

- a) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum;
- b) Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum;
- c) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum;
- d) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan;
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan peraturan pemerintah.⁸²

Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat, penerima bantuan hukum juga berhak mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.⁸³

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum, bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum

⁸² Lembaran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 15.

⁸³ Wahrul Fauzi Silalahi dkk, Bantuan Hukum LBH Bandar Lampung 2018, h. 27.

yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.⁸⁴

Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, yakni:

Pasal 2 berbunyi :

Bantuan hukum diberikan oleh pemberi hukum kepada penerima bantuan hukum.

Pasal 3 berbunyi :

Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Pasal 4 berbunyi :

Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum, yang harus memenuhi syarat:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program bantuan hukum.

Pemberi bantuan hukum dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang telah melalui tahapan *Verifikasi* dan *Akreditasi* sebagai pemberi bantuan hukum, yang telah memenuhi syarat.⁸⁵ Ini sesuai dengan Pasal 2 (pemberi bantuan hukum dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang telah melalui tahapan *Verifikasi* dan *Akreditasi* sebagai pemberi bantuan hukum) Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2014.

⁸⁴ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

⁸⁵ Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin, h. 4.

Pasal 5 berbunyi :

- 1) Pemberian bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, masalah hukum pidana dan masalah hukum tata usaha negara, baik secara *Litigasi* maupun *Nonlitigasi*.
- 2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 6 berbunyi :

- 1) Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon bantuan hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum.
- 3) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus melampirkan:
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 7 berbunyi :

- 1) Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.

Pasal 8 berbunyi :

- 1) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf a, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- 2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1), pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 9 berbunyi :

- 1) Instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2) untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.

- 2) Lurah, Kepala Desa, atau Pejabat yang setingkat sesuai domisili pemberi bantuan hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.

Pemberian bantuan hukum dilakukan pada saat calon penerima

bantuan hukum harus mengajukan pemohon bantuan hukum secara

tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum.⁸⁶ Ini sesuai dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013

pada Pasal 15 Ayat (1) (untuk mendapatkan bantuan hukum, calon

penerima bantuan hukum harus mengajukan pemohon bantuan hukum

secara tertulis atau lisan kepada pemberi bantuan hukum) dan Ayat (2)

permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilampiri dengan :

a. Fotocopy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah

dilegalisir; b. Kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari

Lurah atau Kepala Desa dimana pemohon bantuan hukum berdomisili;

c. Uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang masalah

hukum yang sedang dihadapi.

3. Peran Bantuan Hukum

Persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau

penasehat hukum merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dalam

rangka pencapaian keadilan sosial, juga sebagai salah satu cara

mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang

hukum. Bantuan hukum harus dapat menjamin dan mewujudkan

⁸⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

persamaan di hadapan hukum dengan membela hak-hak orang miskin. Keberhasilan gerakan bantuan hukum sebagai gerakan konstitusional akan meredam potensi ledakan gejolak sosial, serta akan dapat mendorong pencapaian negara hukum yang dicita-citakan.⁸⁷

Bantuan hukum diartikan sebagai pelayanan hukum yang diberikan kepada orang kurang mampu secara cuma-cuma. Pemberi bantuan hukum adalah perseorangan baik sarjana hukum maupun pengacara-pengacara hukum serta badan-badan yang mendapat izin.⁸⁸

Dalam negara hukum, kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia sehingga negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang (*detournement de pouvoir*) dan menyalahgunakan kekuasaan (*abus de pouvoir*). Semua orang yang ditangkap dan ditahan harus diperlakukan adil (*fair*) dan manusiawi. Jika tidak bersalah maka segera dibebaskan dan jika bersalah maka di proses ke pengadilan.⁸⁹

Agama Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi tentang keadilan, termasuk keadilan dalam segi penegakan hukum. Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu :

- a. Melindungi Agama;
- b. Melindungi Jiwa;
- c. Melindungi Keturunan;
- d. Melindungi Akal; dan

⁸⁷ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), h. 124.

⁸⁸ *Ibid*, h. 121.

⁸⁹ *Ibid*, h.125.

e. Melindungi Harta Benda

Bantuan hukum juga dilaksanakan sesuai dengan peran pemberi bantuan hukum yakni memberikan rasa keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi dan akuntabilitas.⁹⁰ Pemberian bantuan hukum dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum terhadap perlindungan jiwa. Perlindungan terhadap jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukuman pelaku yang mengganggu jiwa seseorang.⁹¹

4. Fungsi Bantuan Hukum

Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan dalam konteks UU Bantuan Hukum ini bisa dikatakan bahwa untuk menjalankan fungsi seperti proses konsultasi, pendidikan hukum, investigasi maupun dokumentasi dapat dilakukan seorang advokat. Untuk mengatasinya biasanya dilakukan dengan merekrut *Voluntar Lawyer*, yaitu advokat yang menjadi relawan di organisasi bantuan hukum maupun *Ghost Lawyer*, yaitu advokat mempersiapkan segala sesuatu untuk kepentingan persidangan seperti gugatan, jawab-menjawab dalam peradilan perdata, namun yang hadir/menghadap dipersidangan adalah pencari keadilan sendiri.

Bantuan hukum merupakan bagian dari hukum acara peradilan Islam. Hukum acara peradilan Islam (*fiqh mura'fat*) adalah ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari

⁹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pasal 2.

⁹¹ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 2000), h. 36.

kebenaran dan keadilan. Hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain. Peradilan Islam memiliki 6 unsur peradilan, yakni hakim (*qadhi*), hukum, *mahkum bihi*, *mahkum 'alaihi* (si terhukum), *mahkum lahu* (sipemenang perkara), dan sumber hukum (putusan). Tersangka atau terdakwa dalam hal ini masuk dalam kategori *mahkum 'alaihi* (si terhukum). Dalam hukum acara peradilan Islam terdapat tahap pembuktian. Baik pembuktian yang dilakukan oleh pelaku maupun korban. Sesuai asas praduga tidak bersalah dan persamaan di hadapan hukum, dalam proses pembuktian, terdakwa atau pelaku mendapatkan hak untuk mengajukan pembuktian, seperti; pengakuan, saksi dan alat-alat bukti lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Setelah tahap ini dilalui, hukuman pidana dan hukuman perdata dapat dijatuhkan setelah nyata didapati bukti-bukti yang menyakinkan.⁹²

Bantuan hukum berfungsi sebagai pemutus hukum dan perantara perdamaian dikalangan dua belah pihak yang berselisih serta memiliki tugas penegak hukum dan keadilan. Fungsi bantuan hukum ini dapat diartikan sebuah jasa bantuan hukum yang memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut

⁹² Asadullah Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004), h. 11.

dalam perkara pidana, perkara perdata, ataupun dalam perkara tata usaha negara dihadapan pengadilan sebagai kuasa hukum dalam perkara tersebut, dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan.⁹³

5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga telah mengatur secara tegas mengenai pemberian bantuan hukum yang dapat dilakukan dengan bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang bantuan hukum. Syarat-syarat pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Berbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan Undang-Undang;
- c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program bantuan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemberian bantuan hukum tidak hanya berada di tangan advokat (pemberi bantuan hukum), tetapi juga terdapat pada lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum.

Pasal 9 berbunyi :

- a) Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b) Melakukan pelayanan bantuan hukum;

⁹³ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 119.

- c) Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
- d) Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e) Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
- f) Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g) Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.⁹⁴

Dalam pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan bantuan hukum *ligitasi* dan bantuan hukum *non-ligitasi*. Bantuan hukum *ligitasi* adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian bantuan hukum secara *ligitasi* dilakukan dengan cara:

- a) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; dan
- c) Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.⁹⁵

Non-ligitasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Pemberian bantuan hukum secara *nonligitasi* dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi

⁹⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pasal 9.

⁹⁵ *Ibid*, h. 27-28.

bantuan hukum yang telah lulus *verifikasi* dan *akreditasi*. Pemberian bantuan hukum secara *nonlitigasi* meliputi kegiatan:

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi perkara, baik secara *elektronik* maupun *non-elektronik*;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan diluar pengadilan dan/atau;
9. Drafting dokumen hukum.⁹⁶

Berkaitan dengan pandangan fungsional ini, ada juga yang melihat bahwa hukum itu merupakan suatu lembaga didalam masyarakat yang menegakkan ketertiban dan menjalankan kontrol dengan kualitas tertentu.⁹⁷

Pemberi bantuan hukum memiliki kewajiban dalam bantuan hukum telah disebutkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, yakni:

- a) Melaporkan kepada Menteri tentang program bantuan hukum;
- b) Melaporkan setiap penggunaan anggaran dan negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

⁹⁶ Modul Bantuan Hukum LBH Bandar Lampung 2018, h. 28.

⁹⁷ Bambang Sunggono & Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), h. 23.

- c) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang rekrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a;
- d) Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang; dan
- e) Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.⁹⁸

Pasal 11 berbunyi :

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan *iktikad* baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar bantuan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kode etik advokat.⁹⁹

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum

Untuk Masyarakat Miskin pada :

Pasal 4 berbunyi :

- (1) Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang sedang menghadapi masalah hukum;
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan dan pidana baik litigasi maupun nonlitigasi;
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

⁹⁸ Alian Setiadi dkk, Buku Saku Panduan Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, 2019.h. 31.

⁹⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum;

Pasal 5 berbunyi :

- (1) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri;
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.¹⁰⁰

Pasal 7 berbunyi :

Bantuan hukum berkedudukan sebagai penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi penerima bantuan hukum yang diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan.¹⁰¹

Hak dan kewajiban penerima bantuan hukum serta pemberi bantuan hukum telah disebutkan pada Pasal 9, 10, 11, 12, 13 dan 14, yakni :

Pasal 9 berbunyi :

Penerima bantuan hukum berhak :

- a. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukum selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- b. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁰²

Pasal 10 berbunyi :

Penerima bantuan hukum wajib :

- a. Mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum;
- b. Menyampaikan bukti, informasi dan/atau keterangan yang benar tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya;

¹⁰⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pasal 4-5.

¹⁰¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pasal 7.

¹⁰² Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pasal 9.

c. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.¹⁰³

Pasal 11 berbunyi :

(1) Pemberi bantuan hukum berhak :

- a. Mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;
- b. Untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari
- d. dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

(2) Kerahasiaan hubungannya dengan penerima bantuan hukum;

- e. Keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya memberi bantuan instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum;

(3) Kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh hukum.¹⁰⁴

Pasal 12 berbunyi :

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, kecuali pemberi bantuan hukum telah melanggar Kode Etik Advokat yang harus ditaatinya dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.¹⁰⁵

Pasal 13

Pemberi bantuan wajib:

- a. Merahasiakan segala informasi, keterangan dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
- c. Setiap 6 (enam) bulan sekali melaporkan perkembangan tugasnya ke Bupati.¹⁰⁶

Pasal 14 berbunyi :

Pemberi bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada

¹⁰³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pasal 10.

¹⁰⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pasal 11.

¹⁰⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pasal 12.

¹⁰⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pasal 13

putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.¹⁰⁷

Larangan bagi pemberi bantuan hukum tertera pada Pasal 21 yang berbunyi, Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum.¹⁰⁸

Terkait pendanaan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013

bantuan hukum untuk masyarakat miskin Kabupaten Lampung Utara pada

Pasal 22 berbunyi :

Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.¹⁰⁹

Pasal 23 yang berbunyi :

- (1) Biaya penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dianggarkan pada tiap-tiap tahun anggaran;
- (2) Biaya pelaksanaan bantuan hukum yang diberikana oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kepada pemberi bantuan hukum, dilakukan melalui mekanisme hibah;
- (3) Besarnya hibah yang dapat diberikan kepada masing-masing pemberi bantuan hukum di Kabupaten Lampung Utara adalah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tiap-tiap tahun anggaran;
- (4) Nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan nonligitasi yang akan dihasilkan;
- (5) Nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikurangi atau ditingkatkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan banyaknya kasus yang ditangani.¹¹⁰

Berdasarkan Pasal 31 mengenai sanksi yang berbunyi :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 14 menyebabkan permohonan bantuan hukum dari pemohon bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum ditolak;
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat menyebutkan kerja sama dengan pemberi bantuan hukum dibatalkan sepihak.¹¹¹

¹⁰⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pasal 14.

¹⁰⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pasal 21.

¹⁰⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pasal 22.

¹¹⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pasal 23.

¹¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Pasal 31.

B. Tinjauan Pustaka

Mega Lailatul Hikmah, 2018 "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (Studi di APSI Lampung)", pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Dalam penentuan narasumber ditentukan secara *purposive sampling*, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Prosedur penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*). Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (Studi di APSI Lampung) dan peran dari advokat APSI Lampung dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat ditinjau dalam Islam.¹¹²

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan yakni, *Pertama* aspek lokasi penelitian, *Kedua* pembahasan yang merujuk pada pandangan *fiqh siyasah* (Islam) serta pembahasan mengenai bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu lebih diperjelas sehingga membedakan antara penelitian penulis sendiri dengan penelitian yang lainnya dan penulis membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung

¹¹² Mega Lailatul Hikmah, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat (Studi di APSI Lampung)*, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara), untuk itu penulis anggap penelitian ini penting dan perlu dilakukan.

Kodri Ubaidill, 2016 “Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung”, Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekaan yuridis normatif* dan *yuridis empiris*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber ditentukan secara *purposive*, yaitu dengan menunjuk langsung narasumber yang menguasai permasalahan dalam penelitian ini. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang miskin dalam perkara pidana di Provinsi Lampung oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBHFH UNILA) dan Posbakum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.¹¹³

Berdasarkan kajian ini sebagaimana diuraikan diatas, beda antara penelitian yang penulis lakukan yakni, *pertama*, aspek lokasi penelitian, *kedua*, pembahasan yang merujuk pada pandangan *fiqh siyasah* serta pembahasan mengenai bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu lebih

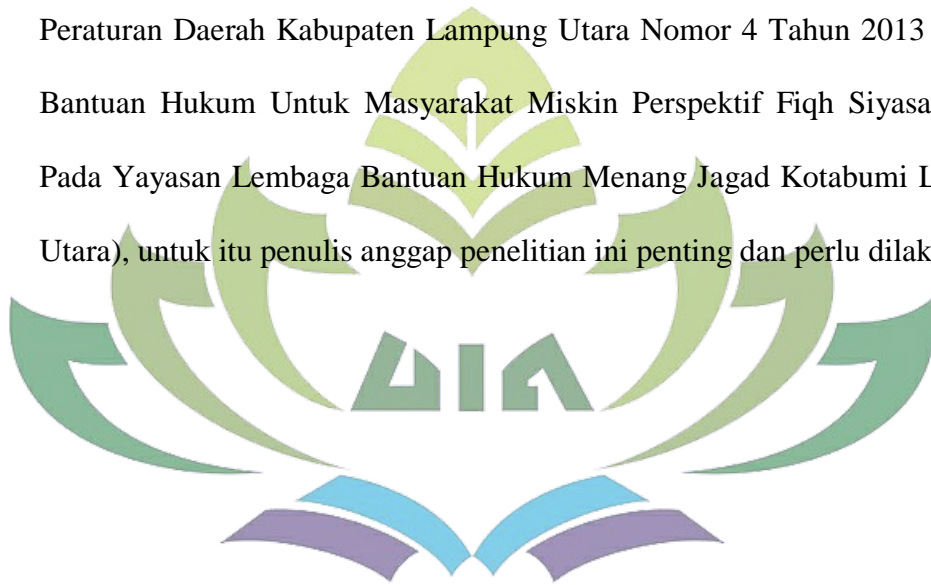
¹¹³ Kodri Ubaidil, *Analisis Perbandingan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Miskin dalam Perkara Pidana di Provinsi Lampung*, Universitas Lampung, 2016.

diperjelas sehingga membedakan antara penelitian penulis sendiri dengan penelitian yang lainnya dan penulis membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara), untuk itu penulis anggap penelitian ini penting dan perlu dilakukan.

Ima Riska Yanti 2018 “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang) dalam Pandangan Hukum Islam” pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan yuridis empiris*. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Dalam penentuan narasumber ditentukan secara *purposive sampling*, dalam hal ini peneliti orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai yang diinginkan. Selain *informan* ada juga istilah *responden* yakni orang atau beberapa orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Prosedur penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan Penelitian Lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu di kantor hukum polis abdi hukum stihpada Palembang, Serta pandangan hukum

pidana Islam terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.¹¹⁴

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan yakni, *pertama*, aspek lokasi penelitian. *Kedua*, pembahasan yang merujuk pada pandangan hukum pidana Islam sehingga membedakan antara penelitian penulis sendiri dengan penelitian yang lainnya, dan penulis membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Menang Jagad Kotabumi Lampung Utara), untuk itu penulis anggap penelitian ini penting dan perlu dilakukan.



¹¹⁴ Ima Riska Yanti, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Studi Kasus di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA Palembang)*, dalam *Pandangan Hukum Islam*, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Abû ‘Abd Allâh Muhammad ibn Muhammad al-Hâkim, *Al-Mu tadarak ‘alâ Shahîhayn*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410 H.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. IkhtiarBaru Van Hoeve, 1996.
- Abdul kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abdurahman, *Beberapa Aspek tentang Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1980.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Agus Sulistyono dan Adi Mulyadi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surakarta : CV. Surakarta, 2008.
- Ahmad Yulianto, Muti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Alian Setiadi dkk, *Buku Saku Panduan Pemberi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin*, 2019.
- Al-Imam Muslim ibn Hajaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978, cet. II, Juz III.
- Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2004.
- Asumni Mth, “Eksistensi Pengacara dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol 12 No. 4, 2014.
- Bambang Sunggono. & Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2009.
- Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, Surabaya : Pustaka Umum, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Fauzin Arifin, wawancara dengan penulis, Kantor LBH Menang Jagad Kotabumi, 29 Januari 2020.

Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2011.

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta : Kencana Group, 2013.

Inda Areskha, *Mewujudkan Keadilan Konstitusional Bagi Fakir Miskin (Bantuan Hukum Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Program Sarjana Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Ibn 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi 1987), vol. 3.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Jhon M. Echolas dan Hasan Shadaly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Riaa Grafindo, 1997.

Karzuli Ali, wawancara dengan penulis, Kantor LBH Menang Jagad Kotabumi, 29 Januari 2020.

Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1989.

Lembaran, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lembaran, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Lembaran, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Malik bin Anas al-Ashabihi, *Al-Muwathatha'*, Beirut: Daar Kutun al-'Alamiyah.

Muhammad Faqih Muslim, *Profesi Advokat dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2009.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualitas Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Pranamedia, 2014

M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.

M. Wagianto, *Peran dan Fungsi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*, Bandar Lampung : Calina Media&Arti Bumi Intaran, 2017.

Modul Bantuan Hukum LBH Bandar Lampung, 2018.

Patra M.Zen, et al, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, YLBHI dan AusAID, 2009.

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2014, *Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin*.

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013, *Tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, *Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013, *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*.

Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Ridwan Widyadharma, *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.

Slaiman bin Muhammad al-Bujarimi, *Hasyiah al-Bujarima ala al-Manhaj* (Bulaq: Musththafa al-Babi al-Halabi, t.t), vol.3

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Liberty Yogyakarta, 1998.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid 1*, Penerbit Psikologi UGM, Yogyakarta, 1983.

Syafruddin, wawancara dengan penulis, Kantor LBH Menang Jagad Kotabumi, Lampung Utara, 29 Januari 2020.

T.M. Hasbi Ash Shidieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

Wahrul Fauzi Silalahi dkk, *Bantuan Hukum*, LBH Bandar Lampung, 2018.

Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyyah*, (Kuwait: Wuzarat al-awqaf al-Kuwaitiyyah, t.t), vol. 25.

Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

<http://www.academia.edu/7235503/.com> Peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Dalam Pemberian Pelayanan Konsultasi dan Bantuan Hukum Kasus Pidana Studi Terhadap Aspek Normatif-Empiris di Surakarta, diakses pada tanggal 19 Januari 2020.

<https://www.pengusahamuslim.com/2748-profesi-pengacara-mengapa-1460.com> (diakses pada tanggal 19 Januari 2020, Jam 20.50 WIB).

